

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, *Rusydi*. 2017. Manajemen Pemasaran. Sayed Mahdi. Alfabeta
- Ariana Septia Herawati. (2016). Evaluasi Sistem Inventaris Manajemen Aset (Sima) Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model(Tam) Di Kantor Pos Sukoharjo 57500, Skripsi, Jurusan Sistem Informasi, STMIK Sinar Nusantara, Surakarta
- Ardiyanto, I., & Widiastuti, E. 2016. Analisis Pengaruh Beban Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan di PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. *Smoothing*, 142.
- A.Subino Hadisubroto. 2011. Keluarga dalam Masyarakat Modern, Bandung: Remaja Rosdakarya, Badan Pusat Statistik. 2017
- Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. 2020. Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Papua*
- Imamudin Yuliadi. Analisis impor Indonesia : Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1. 200
- Mubyarto*. 1996. Membahas Pembangunan Desa. Aditya Media. Yogyakarta
- Priyatno, Dwi. 2014. Mandiri Belajar Analisis Data dengan Spss*. Yogyakarta: Mediakom.
- Rumfandu, Menaser N. 2021. *Analisis Dampak alokasi dana otonomi khusus (Dak) terhadap pembangunan bidang pendidikan di wilayah adat tabi provinsi Papua periode 2014-2018*. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
- Ryan, K., Cooper, J.M., & Tauer, S. 2012. Teaching for student learning*. Boston: Cengage Learning.

Sukirno, Sadono. 2015. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan dasar. Kebijakan. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit. Alfabeta, Bandung.

Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan: Problematika serta Pendekatan, Jakarta: Salemba.

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan. Jilid 1. Jakarta : Erlangga.

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang -Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perda)

